

## **Pengembangan Pariwisata Perdesaan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Pangandaran**

**Gian Ramadhan**

Universitas Galuh Ciamis

**Dini Yuliani**

Universitas Galuh Ciamis

**Asep Nurdin Rosihan Anwar**

Universitas Galuh Ciamis

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

Korespondensi penulis: [mamanlast1235@gmail.com](mailto:mamanlast1235@gmail.com)

**Abstract.** This research is behind the lack of optimal development strategy for Rural Tourism Potential by the Pangandaran Regency Tourism and Culture Office. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data sources include primary data from 6 research informants as well as the results of field observations and secondary data from relevant documents, laws, research journals, and other references. Data collection techniques include interviews, observations and documentation as well as data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, conclusions. The results of the study show that the strategy for developing Rural Tourism Potential by the Pangandaran Regency Tourism and Culture Office. This is evidenced by several indicators that are not optimal, including job creation, gender equality in the tourism community, preservation of culture and arts, cultural awareness, cultural education, tourism waste management, concern for conservation, environmental carrying capacity, and participation of local populations. Obstacles are caused by the lack of local human resource capacity, especially in managerial, digital, and creative aspects; infrastructure inequality between tourist villages; lack of digital and cultural literacy among tourism actors, as well as weak cross-sector coordination between agencies, communities, and village governments. Efforts are made to improve training and empowerment, draft community regulations, encourage digital promotion, cooperation with universities and the private sector, and incorporate cross-sector programs such as Eco Tourism and indigenous peoples' protection.

**Keywords:** Rural Tourism, Strategy Management, Local Government

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya strategi pengembangan Potensi Wisata Perdesaan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi data primer yang berasal dari 6 informan penelitian serta hasil observasi lapangan dan data sekunder yang berasal dari dokumen relevan, undang-undang, jurnal penelitian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan Potensi Wisata Perdesaan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Hal ini dibuktikan oleh beberapa indikator yang belum optimal diantaranya penciptaan lapangan kerja, kesetaraan gender pada komunitas kepariwisataan, pelestarian kebudayaan dan kesenian, kesadaran budaya, edukasi budaya, pengelolaan sampah kepariwisataan, kepedulian terhadap konservasi, daya dukung lingkungan, dan partisipasi penduduk lokal. Hambatan disebabkan oleh minimnya kapasitas sumber daya manusia lokal, terutama dalam aspek manajerial, digital, dan kreatif; ketimpangan infrastruktur antar desa desa wisata; minimnya literasi digital dan budaya di kalangan pelaku wisata, serta lemahnya koordinasi lintas sektor antara dinas, komunitas, dan pemerintah desa. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pelatihan dan pemberdayaan, penyusunan regulasi komunitas, mendorong promosi digital, kerja sama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta, hingga penggabungan program lintas sektor seperti *Eco Tourism* dan perlindungan masyarakat adat.

**Kata Kunci:** Pariwisata Perdesaan, Manajemen Strategi, Pemerintah Daerah

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi pariwisata, perikanan, dan pertanian. Fokus Kabupaten Pangandaran yaitu pada

pengembangan pariwisata dan budaya bahari karena potensi pariwisatanya besar di daerah tersebut, dengan mengacu pada landasan hukum Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat yang memiliki tema pengembangan pariwisata bahari dan alam bahari di Priangan. (Yudha et al., 2024).

Dalam melakukan pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Pangandaran melakukan upaya dengan membuat program yang mengacu pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2025 menyatakan bahwa visi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu “Mewujudkan Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia yang berbasis lingkungan, alam, dan budaya”. Untuk mewujudkan program pengembangan pariwisata sesuai dengan visi yang diterapkan maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran memerlukan strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2025 menyebutkan 4 (empat) strategi pembangunan kepariwisataan yaitu destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKD), pembangunan desa wisata merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kepariwisataan dan pembangunan daerah. Sebagaimana dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Desa Wisata menjelaskan bahwa pembangunan desa wisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun tujuan dari pembangunan dan pengembangan desa wisata yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa melalui pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa, menggerakkan perekonomian masyarakat desa, mendorong terbentuknya identitas desa melalui penguatan karakter yang berkebudayaan dan berkualitas, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi pariwisata ke desa (Sulttan, 2024).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Desa Wisata, pembangunan desa wisata diantaranya industri desa wisata (meliputi pembangunan infrastruktur, pengembangan industri rumahan dan kreatif), daya tarik desa wisata (meliputi pemberdayaan masyarakat, penyediaan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata desa wisata secara terpadu dan berkesinambungan, dan sebagainya), pemasaran pariwisata desa wisata (meliputi Pemasaran Pariwisata Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan), dan kelembagaan desa wisata (meliputi pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, serta mekanisme, operasional, dan sistem kepariwisataan).

Perencanaan dalam melakukan pengembangan wisata di pedesaan memberikan pengaruh terhadap pencapaian yang dihasilkan dalam periode tertentu (Masitah, 2019). Oleh sebab itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran perlu memerhatikan strategi yang akan diterapkan sebagai penunjang keberhasilan pembangunan wisata di perdesaan se-Kabupaten Pangandaran. Jika merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Desa Wisata, menjelaskan strategi pemberdayaan desa wisata. Strategi tersebut mengarah pada pendekatan nilai budaya yang potensial, pemberdayaan potensi wisata, dan kelembagaan yang diperkuat dengan koordinasi, promosi dan komunikasi (Junaid, 2022).

Berdasarkan data yang tercatat pada Jadestra Kemenparekraf diatas bahwa Kabupaten Pangandaran masih memiliki 9 desa wisata rintisan. Artinya bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran masih memiliki desa wisata tahap awal yang harus

dimaksimalkan baik dari segi potensi, operasional, dan promosi supaya dapat masuk ke dalam kategori berkembang dan dari berkembang hingga masuk ke dalam kategori maju. Ketika desa wisata sudah maju dan kelembagaannya yang berintegritas maka potensi wisata tersebut akan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangandaran (Dwianto, 2024).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa strategi pengembangan obyek wisata perdesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator permasalahan, sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran belum maksimal dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi pengembangan desa wisata. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya desa wisata rintisan atau desa wisata baru mekar yang belum berkembang secara signifikan.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran belum maksimal dalam memperhatikan dan mempertahankan kelestarian kesenian dan budaya lokal sebagai strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Pangandaran. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat terutama pada pemuda/i dalam menjaga kelestarian kesenian dan budaya lokal yang dimiliki.
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran belum maksimal dalam membangun kelembagaan pariwisata baik di tingkat daerah maupun di tingkat desa secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa terkait potensi wisata perdesaan, kurangnya promosi wisata perdesaan, minimnya keikutsertaan masyarakat dalam membangun potensi wisata perdesaan, serta kurangnya perhatian pada aspek lingkungan dan infrastruktur di kawasan wisata perdesaan di Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengembangan Potensi Wisata Perdesaan Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran”.

## **KAJIAN TEORITIS**

Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. (Mulyati, dkk., 2022:15).

Pengembangan pariwisata di desa-desa wisata mengacu kepada pemanfaatan potensi lokal yang ada di wilayah tersebut untuk menarik wisatawan. Salah satu contoh keberhasilan pengembangan pariwisata di desa-desa wisata adalah penggunaan kearifan lokal dalam mendesain dan mengelola destinasi pariwisata. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata harus diintegrasikan secara bijaksana agar sesuai dengan karakteristik desa. Pemeliharaan keberlanjutan lingkungan juga harus menjadi prioritas sehingga alam dan kehidupan masyarakat setempat tetap terjaga. (Pitana & Pitanatri, 2023:37-38).

Mulyati, dkk. (2022:16) menyampaikan potensi desa dapat dilihat dari empat hal antara lain a) kehidupan masyarakat desa, b) sumber daya alam, sosial dan budaya, c) lingkungan desa,

dan d) potensi ekonomi desa. Sedangkan, menurut Suansri (2003) dalam Sunaryo (2013:142) menjelaskan 5 (lima) dimensi strategi pengembangan kepariwisataan, sebagai berikut:

1. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.

2. Dimensi Sosial

Dimensi sosial, dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas.

3. Dimensi Budaya

Dimensi budaya, dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam udaya lokal.

4. Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan keperdulian akan perlunya konservasi.

5. Dimensi Politik

Dimesi politik, dengan indikator meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *sampling purposive*. Menurut Widayastuti, dkk. (2024:6) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian yang di mana dalam penerapannya menggunakan data-data yang berasal dari hasil riset yang kemudian dianalisis. Hasil riset pada penelitian ini berasal dari wawancara terhadap informan. Data Primer diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan 6 (enam) informan sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Informan**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Sekertaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	1 Orang
2.	Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1 Orang
3.	Bidang Kebudayaan	1 Orang
4.	Bidang Industri Pariwisata, Investasi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Orang
5.	Kelompok Sadar Wisata	1 Orang
6.	Pemandu Wisata Cagar Alam	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>6 Orang</b>

*Sumber: Olahan Peneliti, Tahun 2025*

Data sekunder berupa dokumen-dokumen relevan seperti undang-undang, rencana kerja pemerintah daerah, jurnal, dan referensi-referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan mengikuti alur berdasarkan Miles dan Hubberman (1992) yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Pemaparan hasil penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana strategi pengembangan potensi wisata perdesaan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten pangandaran. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan *Grand Theory* Menurut Suansri dalam Sunaryo (2013) tentang faktor-faktor keberhasilan pengembangan destinasi wisata. Yang terdiri dari 5 dimensi diantaranya Dimensi Ekonomi, Dimensi social, dimensi kebudayaan, dimensi lingkungan hidup, dimensi politik. Dari hasil wawancara diadapatkan keterangan sebagai berikut:

### **1. Dimensi Ekonomi**

Dimensi pertama yang dapat mempengaruhi berhasilnya Strategi Pengembangan Potensi Wisata Perdesaan Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah aspek ekonomi. Menurut Suansri (2003) dalam Sunaryo (2013:142) aspek ekonomi merupakan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan, baik dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran maupun pelaku komunitas kepariwisataan, ditemukan bahwa penguatan dimensi ekonomi sangat bergantung pada integrasi program komunitas ke dalam perencanaan daerah, penyusunan proposal yang sesuai dengan kebutuhan riil lapangan, serta koordinasi lintas bidang di tingkat pemerintahan. Sekretaris Dinas menyampaikan bahwa pengalokasian anggaran hanya dapat terjadi jika komunitas masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, bidang teknis seperti Tata Kelola Destinasi, Kebudayaan, dan Industri Pariwisata menekankan pentingnya evaluasi kinerja komunitas agar dapat disesuaikan dengan dukungan program anggaran yang tersedia.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menunjukkan komitmen terhadap penguatan ekonomi pariwisata melalui pengalokasian dana untuk pengembangan komunitas. Contohnya adalah penataan kawasan wisata Pantai Batukaras dan kolaborasi dengan Universitas Padjadjaran dalam pengembangan Aspiring Geopark. Partisipasi masyarakat terlihat aktif di sektor usaha kuliner, pengelolaan homestay, dan penyedia jasa pariwisata lainnya. Peneliti juga mencatat keterlibatan perempuan dan pemuda mulai meningkat di beberapa desa wisata, meskipun belum optimal secara menyeluruh.

Hasil analisis dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 mencantumkan alokasi anggaran sebesar Rp297.161.880,00 untuk tiga program utama yang mendukung komunitas kepariwisataan: pelatihan ekonomi kreatif, pembinaan masyarakat, dan pengembangan kapasitas SDM pariwisata berbasis SKKNI. Selain itu, tren peningkatan jumlah rumah makan dari 203 unit (2019–2021) menjadi 233 unit (2023), dan jumlah hotel dari 378 unit (2019) menjadi 432 unit (2023), menunjukkan dinamika positif sektor usaha pariwisata yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Bahkan, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten meningkat dari Rp1.060,12 miliar (2019) menjadi Rp1.449,88 miliar (2023), memperlihatkan bahwa sektor ini telah menjadi penggerak ekonomi daerah.

**Tabel 2. Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB</b>
2019	1.060,12 Miliar
2020	1.091,41 Miliar

2021	1.162,85 Miliyar
2022	1.325,48 Miliyar
2023	1.449,88 Miliyar

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Dari sisi teori, sebagaimana dijelaskan oleh Pitana dan Pitanatri (2023), pariwisata perdesaan idealnya mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemerataan pendapatan masyarakat. Pendapat ini diperkuat oleh Sunaryo (2013) yang menyatakan bahwa tersedianya dana dan penciptaan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal merupakan syarat utama pariwisata yang berkelanjutan. Strategi pengembangan di Pangandaran yang memasukkan program komunitas ke dalam RKPD serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan menunjukkan bahwa teori tersebut telah mulai diimplementasikan secara konkret.

Berdasarkan data wawancara, observasi, dokumen, dan analisis teori, dapat disimpulkan bahwa dimensi ekonomi dalam strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran telah berjalan cukup optimal. Hal ini ditunjukkan oleh tren peningkatan pendapatan masyarakat lokal melalui sektor UMKM, penciptaan lapangan kerja di sektor jasa wisata dan perhotelan, serta adanya sinergi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga eksternal. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan dari sisi pelibatan komunitas secara lebih aktif dan pemerataan pembangunan ekonomi pariwisata antardesa.

Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi adalah: kurangnya sinkronisasi antarbidang dalam Dinas Pariwisata, rendahnya partisipasi komunitas dalam menyusun program, keterbatasan data potensi komunitas, serta minimnya kapasitas pelaku usaha lokal, terutama dalam pengelolaan digital dan akses pasar. Selain itu, kesenjangan infrastruktur antar wilayah dan rendahnya partisipasi generasi muda juga turut menjadi penghambat keberhasilan dimensi ekonomi secara merata.

Sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah mengintensifkan perencanaan partisipatif melalui forum Musrenbang dan pelibatan Pokdarwis dalam penyusunan program. Selain itu, dilakukan pelatihan teknis dan kewirausahaan, pengembangan pemasaran digital, serta penyediaan insentif bagi komunitas aktif. Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan pelaku industri juga terus diperluas untuk memperkuat daya saing komunitas dan memperluas jangkauan pasar. Dengan demikian, strategi pembangunan ekonomi pariwisata di Kabupaten Pangandaran semakin mengarah pada pola yang kolaboratif, evaluatif, dan berbasis bukti.

## **2. Dimensi Sosial**

Dimensi kedua yang dapat mempengaruhi berhasilnya Strategi Pengembangan Potensi Wisata Perdesaan Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah aspek sosial. Menurut Suansri (2003) dalam Sunaryo (2013:142) aspek sosial merupakan aspek yang berkaitan dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas.

Berdasarkan hasil wawancara, informan dari Dinas Pariwisata dan pelaku komunitas menyatakan bahwa keberadaan destinasi wisata perdesaan telah membuka peluang ekonomi dan sosial bagi masyarakat, terutama melalui layanan homestay, kuliner, kerajinan, dan jasa wisata. Masyarakat merasa lebih sejahtera berkat keterlibatan langsung dalam pengelolaan wisata desa. Meski begitu, hambatan tetap muncul, seperti rendahnya kunjungan wisatawan, minimnya promosi, dan kurangnya kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam mengelola destinasi.

Untuk mengatasinya, pemerintah mengadakan pelatihan, pembinaan, promosi digital, dan pemberdayaan UMKM.

Hasil observasi menunjukkan bahwa desa wisata seperti Selasari, yang menjadi bagian dari program ADWI, telah menunjukkan perubahan sosial yang signifikan. Kegiatan ekonomi berbasis wisata seperti kerajinan bambu, jasa transportasi lokal, dan kuliner tradisional semakin aktif. Partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan mereka dalam penyediaan homestay dan kegiatan pelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai wahana pemberdayaan sosial dan komunitas yang produktif. Pengamatan juga menunjukkan bahwa hubungan sosial diperkuat melalui kerja sama lintas usia dan gender, gotong royong dalam menjaga destinasi, dan keterlibatan aktif dalam pelatihan serta kegiatan komunitas.

Secara dokumen, peningkatan sosial masyarakat tercermin dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran dari 68,21 (2019) menjadi 70,57 (2023). Kenaikan ini menunjukkan peningkatan di aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang tidak terlepas dari pengaruh pengembangan wisata perdesaan. Dokumen juga menunjukkan pengukuhan 49 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan wujud konkret dari penguatan institusi sosial masyarakat. Selain itu, data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan dan partisipasi perempuan di sektor pariwisata. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang naik dari 61,55% menjadi 70,98% (2019–2023) memperkuat peran sosial perempuan dalam industri pariwisata lokal.

Menurut teori Suansri dalam Sunaryo (2013), pariwisata yang dikembangkan secara partisipatif dan adil secara sosial dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Begitu pula menurut Pitana & Pitanatri (2023), pembangunan pariwisata dapat menjadi instrumen memperkuat relasi sosial melalui komunikasi, gotong royong, dan inklusivitas. Pendekatan ini juga mendorong terciptanya organisasi komunitas berbasis meritokrasi, kesetaraan gender, dan keterlibatan lintas usia.

Berdasarkan integrasi wawancara, observasi, dan dokumen, strategi sosial dalam pengembangan wisata perdesaan di Kabupaten Pangandaran dinilai telah berjalan cukup optimal. Terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial-ekonomi berbasis wisata, penguatan kapasitas sosial melalui pelatihan, serta tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menjaga dan mengelola desa wisata. Namun, implementasinya belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses informasi.

Adapun hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas SDM lokal, rendahnya literasi digital, kesenjangan infrastruktur, serta minimnya kesadaran masyarakat tentang peran strategis mereka dalam pariwisata. Hambatan lainnya adalah dominasi tokoh laki-laki senior dalam organisasi komunitas, sehingga partisipasi perempuan dan pemuda masih terbatas pada posisi pendukung. Lemahnya koordinasi antar stakeholder juga menghambat hubungan sosial yang inklusif dan kolaboratif.

Sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut, Dinas Pariwisata melakukan pembinaan Pokdarwis, pelatihan berbasis kesetaraan gender dan meritokrasi, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta. Dinas juga mendorong penyusunan regulasi teknis yang menjamin keterwakilan gender dan usia dalam organisasi wisata, memperluas promosi melalui media digital, dan membentuk forum komunikasi masyarakat desa wisata. Gotong royong dan solidaritas komunitas seperti yang terjadi di Pantai Batuhi menjadi contoh nyata bahwa hubungan sosial yang kuat dapat memperkuat kualitas destinasi pariwisata secara berkelanjutan.

### **3. Dimensi Kebudayaan**

Dimensi ketiga yang dapat mempengaruhi berhasilnya Strategi Pengembangan Potensi Wisata Perdesaan Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah aspek kebudayaan. Menurut Suansri (2003) dalam Sunaryo (2013:142) aspek kebudayaan merupakan aspek yang berkaitan dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pariwisata dan para pelaku wisata di Kabupaten Pangandaran telah mendorong pelestarian budaya melalui berbagai program seperti pembinaan generasi muda, festival kesenian, pertunjukan tradisional, dan pelatihan seni. Penekanan diberikan pada pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga warisan budaya sebagai bagian dari daya tarik wisata. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain adalah rendahnya minat anak muda akibat arus globalisasi, minimnya ruang ekspresi budaya, dan belum meratanya atraksi budaya di seluruh desa wisata. Wawancara juga menunjukkan bahwa program edukasi toleransi budaya telah dilaksanakan, namun belum mampu mengubah kebiasaan lama yang kurang menghargai keberagaman budaya.

Berdasarkan hasil observasi, pelestarian budaya terlihat melalui pembentukan Dewan Kebudayaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, tokoh budaya, dan komunitas lokal. Di samping itu, pertunjukan seni tradisional seperti ronggeng gunung, lebon, dan badud mulai diintegrasikan ke dalam atraksi desa wisata. Observasi juga mencatat adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya di berbagai lokasi wisata seperti Batu Karas dan Pantai Karapyak. Inisiatif tersebut membuka ruang interaksi antara budaya lokal dan wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus menjadi media edukasi lintas budaya. Namun, keterlibatan belum merata di seluruh desa wisata, dan regenerasi pelaku seni tradisi masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Dari sisi analisis dokumen, data menunjukkan adanya peningkatan jumlah cagar budaya yang dilestarikan dari 30 (2019) menjadi 40 (2023). Jumlah kelompok budaya aktif juga meningkat tajam, dari 0 pada 2019 menjadi 218% pada 2022, meskipun sedikit menurun pada 2023. Revitalisasi karya budaya menunjukkan fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada 2022 sebanyak 11 karya. Kunjungan wisatawan mancanegara pun mengalami fluktuasi drastis akibat pandemi, dari 117.767 orang (2019) menjadi 0 (2021), lalu mulai meningkat kembali menjadi 3.546 orang pada 2023. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pelestarian budaya dan peningkatan keterlibatan, konsistensi program dan cakupannya masih belum merata dan berkelanjutan.

Menurut teori Pitana & Pitantri (2023), desa wisata berperan sebagai wahana pelestarian budaya lokal yang mampu menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan tradisional. Sementara itu, Sunaryo (2013) menekankan bahwa kesadaran budaya dan penghormatan terhadap pluralitas budaya merupakan fondasi penting dalam membangun desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua teori tersebut menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak hanya berfungsi menjaga nilai-nilai lokal, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menciptakan toleransi dan kohesi masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan, indikator pelestarian budaya dalam strategi pengembangan wisata perdesaan di Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat inisiatif seperti pembentukan Dewan Kebudayaan, penyelenggaraan festival seni, dan peningkatan kelompok budaya aktif, data menunjukkan bahwa revitalisasi karya budaya belum stabil dan program pelestarian belum menjangkau seluruh desa

wisata. Demikian pula dengan program toleransi budaya yang baru menjangkau sebagian kecil masyarakat dan belum sepenuhnya mengubah pola pikir tradisional.

Adapun hambatan yang diidentifikasi meliputi rendahnya minat generasi muda akibat arus globalisasi, minimnya forum budaya di tingkat komunitas, keterbatasan sarana edukasi budaya, dan regenerasi pelaku seni yang lamban. Hambatan lainnya adalah rendahnya literasi budaya masyarakat dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menghormati keberagaman budaya, baik antar budaya lokal maupun dengan budaya asing. Pengaruh globalisasi yang tidak diimbangi dengan penguatan identitas budaya juga memperlemah daya tahan budaya lokal, khususnya di kalangan muda.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya oleh Dinas Pariwisata dan para pemangku kepentingan. Di antaranya adalah pelatihan seni dan budaya untuk generasi muda, penyelenggaraan lomba kesenian, atraksi budaya di berbagai desa wisata, serta pendirian Dewan Kebudayaan sebagai forum koordinatif. Pemerintah daerah juga mulai mengembangkan forum komunikasi lintas komunitas dan mengadakan pelatihan etika kepariwisataan untuk Pokdarwis agar menjadi agen toleransi budaya. Penguatan karakter masyarakat melalui budaya lokal serta integrasi nilai-nilai budaya dalam kegiatan wisata menjadi strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan budaya di tengah dinamika pariwisata modern.

#### **4. Dimensi Lingkungan Hidup**

Dimensi keempat yang dapat mempengaruhi berhasilnya Strategi Pengembangan Potensi Wisata Perdesaan Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah aspek lingkungan hidup. Menurut Suansri (2003) dalam Sunaryo (2013:142) aspek lingkungan hidup merupakan aspek yang berkaitan dengan indikator mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan keperdulian akan perlunya konservasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, telah dilakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di kawasan wisata perdesaan. Upaya tersebut mencakup penyediaan sistem pengelolaan sampah dengan membentuk tim kebersihan, penempatan fasilitas kebersihan, serta edukasi kepada masyarakat dan wisatawan melalui papan imbauan. Dinas juga bekerja sama lintas sektor dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemerintah desa, serta komunitas lokal untuk kegiatan bersih pantai, tanam pohon, dan pelatihan lingkungan kepada pelajar dan pelaku wisata. Meski demikian, informan menyebut bahwa masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat, tidak meratanya fasilitas, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Dalam hal konservasi, Dinas juga mendorong pelestarian melalui pembangunan kawasan Eco Tourism, seperti di Green Canyon, dan pemantauan daya tampung lingkungan. Namun, keterbatasan anggaran dan kurangnya partisipasi pelaku usaha menjadi tantangan yang signifikan.

Dari hasil observasi, ditemukan bahwa pengelolaan lingkungan di beberapa kawasan wisata utama seperti Pantai Pangandaran, Green Canyon, dan Batu Hiu belum sepenuhnya optimal. Tumpukan sampah masih terlihat di lokasi wisata saat musim liburan, terutama akibat keterlambatan pengangkutan karena kemacetan lalu lintas. Meskipun terdapat penyediaan fasilitas seperti tempat sampah dan tim kebersihan, sistem tersebut tidak cukup adaptif terhadap lonjakan pengunjung. Di sisi lain, kawasan Green Canyon menunjukkan perkembangan positif dengan penerapan konsep *Eco Tourism* berbasis kolaborasi PLN dan Pemda, yang meliputi konversi mesin perahu ke listrik, penggunaan PLTS, serta pengolahan limbah FABA. Namun, praktik ini masih terbatas pada lokasi tertentu dan belum menjadi standar di seluruh kawasan wisata perdesaan Pangandaran.

Berdasarkan hasil analisis dokumen, capaian pengelolaan sampah selama 2019–2023 tergolong rendah dan fluktuatif. Persentase penanganan sampah hanya mencapai 30,79% pada 2023, meskipun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum menjadi sistem yang mapan dalam mendukung keberlanjutan pariwisata. Selain itu, dokumen Rencana Pola Ruang 2025 menunjukkan adanya komitmen terhadap konservasi melalui penetapan kawasan lindung, seperti kawasan resapan air (3.441 ha), sempadan sungai (3.990 ha), cagar alam, dan kawasan lindung geologi (15.882 ha). Namun, efektivitas pengelolaannya masih perlu ditingkatkan karena belum menyentuh aspek partisipasi masyarakat dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan secara optimal.

Menurut teori Sunaryo (2013), pengelolaan lingkungan yang efektif dalam konteks pariwisata mencakup pengendalian daya dukung kawasan (carrying capacity), konservasi sumber daya alam, serta mitigasi dampak lingkungan dari aktivitas wisata. Sementara Pitana & Pitanatri (2023) menegaskan bahwa keberlanjutan alam hanya tercapai jika konservasi menjadi bagian utama dari kebijakan, kelembagaan, hingga praktik di lapangan. Dengan merujuk teori tersebut, maka berbagai program dan kebijakan di Kabupaten Pangandaran telah mengarah pada prinsip keberlanjutan, namun pelaksanaannya belum menyeluruh dan sistematis.

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa indikator lingkungan hidup dalam strategi pengembangan wisata perdesaan di Kabupaten Pangandaran belum berjalan optimal. Persentase penanganan sampah yang masih rendah, tumpukan sampah saat liburan, dan kurang meratanya fasilitas kebersihan menunjukkan lemahnya daya dukung kawasan dalam mengatasi dampak lingkungan dari pariwisata massal. Meski terdapat inovasi seperti Eco Tourism dan pemanfaatan energi bersih di Green Canyon, hal itu belum direplikasi secara luas di desa-desa wisata lainnya.

Beberapa hambatan utama yang dihadapi antara lain adalah kurangnya armada pengangkut sampah, minimnya fasilitas kebersihan di titik wisata, rendahnya kesadaran lingkungan dari wisatawan dan masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi seperti DLH, Dinas Pariwisata, dan pemerintah desa. Pada saat musim liburan, kemacetan menyebabkan keterlambatan pengangkutan sampah, yang memicu penumpukan. Selain itu, masih banyak pelaku wisata yang belum terlibat aktif dalam konservasi lingkungan, dan kurangnya fasilitas edukasi juga memperparah situasi ini.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersama DLH dan mitra strategis. Di antaranya adalah penambahan tempat sampah, pembentukan tim kebersihan dan pengawasan di kawasan wisata, edukasi publik melalui media sosial, serta pengembangan komunitas peduli lingkungan. Di Green Canyon, kolaborasi dengan PLN menjadi model pengelolaan lingkungan yang menggabungkan teknologi ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga sedang menyusun rencana jangka panjang untuk mitigasi dampak lingkungan, termasuk perencanaan zonasi kawasan lindung yang lebih ketat, usulan penambahan anggaran, dan peningkatan pelatihan kepada pengelola destinasi. Upaya integratif dan partisipatif terus digenjot agar pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha wisata.

## 5. Dimensi Politik

Dimensi kelima yang dapat mempengaruhi berhasilnya Strategi Pengembangan Potensi Wisata Perdesaan Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah aspek politik. Menurut Suansri (2003) dalam Sunaryo (2013:142) aspek politik merupakan aspek yang berkaitan dengan Dimesi politik, dengan indikator meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal,

peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor wisata perdesaan telah menjadi perhatian penting. Dinas telah mendorong partisipasi warga melalui forum musyawarah desa wisata, pelatihan UMKM berbasis pariwisata, pembinaan Pokdarwis, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan desa wisata. Di sisi lain, dinas juga memfasilitasi jejaring komunitas dengan berbagai aktor eksternal seperti pihak swasta, akademisi, dan asosiasi pariwisata melalui forum dan pelatihan agar masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi yang lebih luas. Selain itu, upaya pelibatan masyarakat adat juga terus didorong, khususnya dalam pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal, seperti pada tradisi Hajat Laut. Namun, wawancara juga mengungkap adanya sejumlah hambatan, seperti rendahnya kesadaran dan motivasi warga, kurangnya partisipasi generasi muda, lemahnya komunikasi pemerintah desa, serta keterbatasan kapasitas komunitas dalam menjalin kemitraan strategis.

Dari hasil observasi di lapangan, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata belum merata. Contoh positif dapat ditemukan di Desa Wisata Selasari, Kecamatan Parigi, yang menunjukkan tingginya peran masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata lokal seperti body rafting dan eksplorasi gua. Komunitas lokal aktif dalam menyediakan jasa wisata, homestay, kuliner, dan promosi digital, dengan pelibatan generasi muda secara aktif. Contoh lainnya adalah kawasan Green Canyon, di mana telah terbentuk jejaring strategis antara Pokdarwis, pemerintah daerah, dan PLN dalam pengembangan Eco Tourism. Kolaborasi ini menghasilkan berbagai inovasi ramah lingkungan, seperti konversi mesin perahu ke listrik dan pelatihan elektrifikasi gaya hidup. Di sisi lain, observasi terhadap tradisi Hajat Laut di komunitas nelayan menunjukkan bahwa masyarakat adat masih memiliki ruang partisipasi yang dihargai oleh pemerintah melalui dukungan pelaksanaan ritual dan promosi budaya. Namun, keberhasilan ini masih bersifat lokal dan belum menyebar secara merata di seluruh wilayah pariwisata Pangandaran.

Berdasarkan dokumen resmi seperti RKPD dan laporan kegiatan Dinas Pariwisata, strategi pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian dari program prioritas. Dukungan terhadap Pokdarwis, fasilitasi jejaring dengan aktor eksternal, serta pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan wisata merupakan komitmen formal yang telah diupayakan. Namun, dokumen tersebut juga menggarisbawahi perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan komunitas, pembinaan jangka panjang, serta perencanaan berbasis potensi lokal untuk memastikan bahwa pelibatan masyarakat tidak hanya bersifat formalitas atau event-based.

Menurut teori Sunaryo (2013), partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata adalah syarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan, baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi. Dalam konteks ini, masyarakat harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar objek program pembangunan. Selaras dengan itu, Karta (2023) menyatakan bahwa jejaring strategis antar aktor lokal dengan pihak eksternal seperti swasta, akademisi, dan pemerintah merupakan kunci keberhasilan destinasi wisata perdesaan. Teori Suansri dalam Sunaryo (2013) juga menekankan pentingnya jaminan hak-hak masyarakat adat sebagai bentuk keadilan politik dan landasan pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa indikator partisipasi sosial dalam pengembangan wisata perdesaan di Kabupaten Pangandaran sudah mulai berjalan, tetapi belum optimal. Meskipun terdapat praktik-praktik baik seperti di Selasari, Green Canyon, dan

komunitas Hajat Laut, keberhasilan ini belum menjangkau seluruh desa wisata. Masih banyak komunitas yang pasif, serta belum memiliki kapasitas kelembagaan dan jejaring yang kuat.

Hambatan utama dalam implementasi dimensi sosial ini mencakup rendahnya minat generasi muda terhadap pariwisata, kurangnya kesadaran masyarakat tentang peran strategis mereka, lemahnya komunikasi antara desa dan warganya, serta belum optimalnya pemetaan mitra potensial untuk kerja sama. Di sisi masyarakat adat, hambatan mencakup belum adanya pengakuan kelembagaan yang kuat, rendahnya kapasitas organisasi adat, dan potensi konflik nilai antara konservasi adat dan pariwisata modern.

Sebagai bentuk upaya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan berbagai strategi seperti integrasi pelatihan UMKM dengan wisata, kampanye sadar wisata, pemberdayaan Pokdarwis, serta pelatihan jejaring komunikasi. Dinas juga menyusun regulasi perlindungan adat, memfasilitasi partisipasi komunitas dalam forum wisata, serta menampilkan praktik baik dari desa wisata sukses agar dapat direplikasi. Di sisi adat, pendekatan yang dilakukan mencakup fasilitasi event budaya, pelatihan teknis, dan integrasi nilai-nilai lokal dalam narasi resmi pariwisata Pangandaran. Dengan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, pelibatan masyarakat diharapkan menjadi landasan dalam pengembangan wisata perdesaan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kearifan lokal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan potensi wisata perdesaan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan oleh beberapa indikator yang belum optimal seperti penciptaan lapangan kerja, kesetaraan gender pada komunitas kepariwisataan, pelestarian kebudayaan dan kesenian, kesadaran budaya, edukasi budaya, pengelolaan sampah kepariwisataan, kepedulian terhadap konservasi, daya dukung lingkungan, dan partisipasi penduduk lokal terhadap pengembangan potensi wisata perdesaan di Kabupaten Pangandaran.

Hambatan pada pelaksanaan strategi ini meliputi minimnya kapasitas sumber daya manusia lokal, terutama dalam aspek manajerial, digital, dan kreatif; ketimpangan infrastruktur antar desa wisata; minimnya literasi digital dan budaya di kalangan pelaku wisata, serta lemahnya koordinasi lintas sektor antara dinas, komunitas, dan pemerintah desa. Selain itu, belum tersedia regulasi teknis yang mengatur keterlibatan gender dan usia dalam organisasi kepariwisataan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melestarikan budaya lokal.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam mengatasi hambatan antara lain meningkatkan pelatihan dan pemberdayaan, penyusunan regulasi komunitas, mendorong promosi digital, kerja sama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta, hingga penggabungan program lintas sektor seperti *Eco Tourism* dan perlindungan masyarakat adat. Pemerintah juga mulai menguatkan forum jejaring komunitas, mengembangkan narasi wisata berbasis kearifan lokal, serta memperkuat kapasitas kelembagaan Pokdarwis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Karta, N. L. P. A., dkk. (2023). *Manajemen Strategik Konsep Dan Implementasi*. Bali: UNTRIM Press.
- Mulyati, T., dkk. (2022). *Membangun Desa Wisata: Sinergi Antara Potensi & Pemberdayaan*. Klaten: Lakeisha.

- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Pitana, I. G., & Pitanatri, P. D. S. (2023). *Desa Wisata Dan Wisatawan Nusantara: Merajut Ekonomi, Budaya, Dan Lingkungan Dalam Pariwisata Perdesaan*. Bantul: Mata Kata Inspirasi.
- Sunaryo, Bambang. (2013). “Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia”. Yogyakarta : Grava Media.
- Widyastuti, T. A. R., & dkk. (2024). *Metodologi Penelitian (Panduan Lengkap Penulisan Karya Tulis Ilmiah)*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

#### **Artikel Jurnal**

- Dwianto, A. S., Wijanarko, A. A., Kurniaty, D., & Wiadi, I. (2024). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Desa Cinta Karya-Kecamatan Parigi Pangandaran.
- Junaid, I., Dewi, W. O., Said, A., & Hanafi, H. (2022). Pengembangan desa wisata berkelanjutan: Studi kasus di desa Paccekke, kabupaten Barru, Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 6(3), 287-301.
- Masitah, I. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 45-55.
- Sultan, M., Purnomo, M. A. W., Nurmala, A., Andiyni, S. D., & Budiawan, A. (2024). Edukasi Potensi Peninggalan Sejarah Kabuyutan Galuh Bojongloa di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Sebagai Desa Wisata. *Abdimas Galuh*, 6(2), 1428-1438.
- Yudha, E. P., Carli, Z. A. P., Sinaga, R., Mufid, F. H., Nuryani, N., Nabiilah, P., ... & Dina, R. A. (2024). Pemanfaatan Media Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata Sukamulya, Langkaplancar, Pangandaran. *Abdimas Galuh*, 6(1), 910-920.

#### **Undang-Undang**

- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Desa Wisata
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.